

PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN RUCAH DI KEPULAUAN SELAYAR

Policy Brief ini ditulis oleh:

- 1. Nasruddin Tajuddin**
- 2. Lisna Liana**
- 3. Adi Wijaya**

Policy Brief ini ditujukan untuk:

- 1. Dinas Perikanan**
- 2. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Industri pengolahan ikan rucah di Kepulauan Selayar terhambat oleh ketergantungan cuaca, fasilitas pengeringan tidak memadai, dan minimnya diversifikasi produk. Produksi harian 7,5–500 kg dengan harga kering Rp 10.000–50.000/kg, namun musim hujan menimbulkan kerugian dan penjualan murah. Survei menunjukkan 100% responden belum memproduksi tepung ikan meski 69% berminat jika mendapat dukungan teknologi. Rekomendasi memprioritaskan Sentra Pengolahan Ikan Terpadu (SPIT) pilot kapasitas 50–100 kg/hari di Bontosunggu dan Mekar Indah, pelatihan KUB, pemasaran online, skema kredit lunak, dan sistem monitoring berbasis KPI. Langkah ini diharapkan menstabilkan pendapatan, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing perikanan lokal.

PENDAHULUAN

Industri pengolahan ikan rucah di Kepulauan Selayar menghadapi tantangan struktural yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu dan Desa Mekar Indah Kecamatan Buki, teridentifikasi permasalahan kompleks dalam rantai nilai pengolahan ikan skala kecil yang memerlukan intervensi kebijakan terpadu.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 16 responden yang terdiri dari nelayan dan pengolah ikan menunjukkan bahwa produksi ikan rucah di kedua lokasi mencapai 1-20 keranjang per hari (1 keranjang = 25 kg) untuk jenis Ikan Lure dan Manairi di Bontoharu, serta 7,5-150 kg per hari untuk Ikan Masa di Buki. Harga jual ikan kering berkisar antara Rp 13.000-50.000 per kg tergantung jenis ikan.

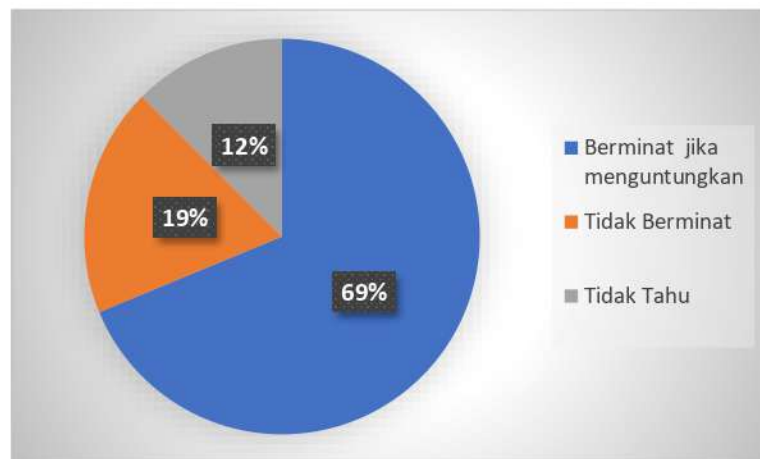
Tabel 1. Ringkasan Data Produksi dan Harga

Lokasi	Jenis Ikan	Produksi (kg/hari)	Harga Kering (Rp/kg)	Pembeli Utama
Bontoharu	Ikan Manairi	75-500	13.000-20.000	Konsumen Langsung, Pengepul Lokal dan
	Ikan Lure	75-500	35.000-50.000	Pengepul Luar (Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bau-bau dan Maumere)
Buki	Ikan Masa	7,5-150	10.000	Konsumen Langsung dan Pedagang Pasar

Observasi lapangan mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, ketergantungan terhadap cuaca untuk proses pengeringan alami menyebabkan kerugian ekonomi signifikan saat musim hujan, di mana sebagian ikan harus dibuang atau dijual kepada peternak ikan keramba dengan harga rendah (Rp 4.000 per kg). Kedua, keterbatasan infrastruktur pengeringan memaksa pengolah menggunakan bahu jalan dan tanggul sebagai tempat penjemuran, yang tidak higienis dan berisiko kontaminasi. Ketiga, tidak adanya diversifikasi produk pengolahan menyebabkan nilai tambah rendah dan ketergantungan pada satu jenis produk.

Pengamatan di lapangan menunjukkan kondisi fasilitas pengolahan yang masih tradisional dengan peralatan seadanya. Sebanyak 100% responden menyatakan belum pernah mengolah ikan menjadi tepung, meskipun 69% diantaranya menunjukkan ketertarikan jika ada bantuan dan jaminan menguntungkan. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi besar untuk pengembangan industri hilir yang belum termanfaatkan.

Grafik 1. Minat Pengolahan Tepung Ikan



Dampak dari permasalahan ini mencakup rendahnya pendapatan masyarakat pesisir, tingginya tingkat kehilangan hasil tangkap (*food loss*), dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan. Kondisi ini berkontribusi pada persistensi kemiskinan di wilayah pesisir dan rendahnya daya saing produk perikanan lokal di pasar regional. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, permasalahan struktural ini akan terus menghambat pengembangan ekonomi perikanan yang berkelanjutan di Kepulauan Selayar.

DESKRIPSI MASALAH

Permasalahan pengolahan ikan rucah di Kepulauan Selayar mencerminkan tantangan umum yang dihadapi industri perikanan skala kecil di negara berkembang. Menurut Nikijuluw (2002) dalam "Aktivitas Perikanan dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir", keterbatasan teknologi pengolahan dan infrastruktur pendukung merupakan faktor utama yang menghambat peningkatan nilai tambah produk perikanan tradisional. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Dahuri et al. (2001) yang menyatakan bahwa pengembangan industri perikanan memerlukan dukungan teknologi tepat guna dan sistem pemasaran yang efektif.

Kebijakan *existing* pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui Program Bantuan Mesin Penepung Ikan dan Pengereng tahun anggaran 2019 sebanyak 10 unit. Namun, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut tidak termanfaatkan optimal karena spesifikasi mesin yang berskala industri tidak sesuai dengan kapasitas produksi masyarakat. Mesin hanya digunakan sesekali untuk pelatihan pembuatan abon dan bakso, tidak untuk operasional rutin pengolahan tepung ikan.

Analisis situasi menunjukkan kesenjangan antara kebijakan *top-down* dengan kebutuhan riil masyarakat. Data lapangan mengungkap bahwa rata-rata produksi harian pengolah ikan hanya 1-20 keranjang, sementara mesin bantuan dirancang untuk kapasitas

industri besar. Hal ini menciptakan paradoks dimana bantuan teknologi justru menjadi tidak fungsional karena tidak sesuai skala usaha. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik usaha mikro dan kecil di sektor perikanan.

Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi penyebab struktural utama. Tidak tersedianya tempat pengeringan yang memadai memaksa pengolah menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan dan tanggul, yang berimplikasi pada kualitas produk dan risiko kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan total pada pengeringan alami yang rentan terhadap perubahan cuaca.

Faktor penyebab masalah dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi. Pertama, keterbatasan modal usaha yang menyebabkan pengolah tidak mampu berinvestasi pada infrastruktur dan teknologi yang lebih baik. Kedua, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi pengolahan modern dan manajemen usaha. Ketiga, lemahnya akses pasar dan informasi harga yang menyebabkan posisi tawar yang rendah dalam rantai nilai. Keempat, belum adanya kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan infrastruktur, teknologi, dan akses pasar secara holistik.

Kondisi musiman yang tidak dapat diprediksi menambah kompleksitas permasalahan. Data menunjukkan bahwa masa panen berlangsung 1-3 bulan dengan masa paceklik 2-6 bulan, menciptakan fluktuasi pendapatan yang ekstrem. Tanpa diversifikasi produk dan teknologi pengawetan yang memadai, masyarakat pesisir menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tinggi.

ALTERNATIF SOLUSI

Kompleksitas permasalahan pengolahan ikan rucah di Kepulauan Selayar memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif dan berkelanjutan. Isu strategis yang diangkat dalam *policy brief* ini adalah perlunya transformasi sistem pengolahan ikan tradisional menuju industri perikanan yang bernilai tambah tinggi melalui penguatan kapasitas teknis, infrastruktur pendukung, dan akses pasar. Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pengalaman berbagai daerah dan negara memberikan pembelajaran berharga tentang alternatif kebijakan pengembangan industri perikanan skala kecil. Program *Fish Processing Centers* di Kerala, India, menunjukkan keberhasilan melalui pendekatan klaster industri yang mengintegrasikan fasilitas bersama, pelatihan teknis, dan akses pasar. Di Indonesia, Kabupaten

Gunungkidul berhasil mengembangkan industri pengolahan ikan teri melalui program Sentra Pengembangan Agribisnis Perikanan (SPAP) yang menyediakan infrastruktur pengolahan bersama dan pendampingan pemasaran. Sementara itu, Filipina mengimplementasikan *Community-Based Fish Processing Program* yang menekankan pada transfer teknologi tepat guna dan pembentukan koperasi pemasaran.

Berdasarkan *best practices* tersebut dan kondisi spesifik Kepulauan Selayar, dirumuskan tiga alternatif kebijakan utama. Alternatif pertama adalah Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan Terpadu (SPIT) dengan pendekatan klaster industri. Program ini mencakup pembangunan fasilitas pengolahan bersama yang dilengkapi dengan mesin penepung ikan skala kecil-menengah, ruang pengeringan terkontrol, *cold storage*, dan laboratorium uji kualitas. Setiap sentra dirancang untuk melayani kelompok pengolah dengan kapasitas 50-100 kg per hari, sesuai dengan skala produksi eksisting masyarakat.

Alternatif kedua adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Berbasis Teknologi Tepat Guna. Pendekatan ini fokus pada transfer teknologi pengolahan sederhana yang dapat diadopsi oleh rumah tangga pengolah, seperti *solar dryer* untuk pengeringan ikan dan mesin penepung skala rumah tangga. Program ini disertai dengan pelatihan intensif manajemen usaha, *quality control*, dan diversifikasi produk olahan.

Alternatif ketiga adalah Sistem *Integrated Coastal Aquaculture-Processing* (ICAP) yang mengintegrasikan budidaya ikan dengan pengolahan produk hilir. Model ini mengembangkan keramba jaring apung untuk menjamin kontinuitas bahan baku, dilengkapi dengan fasilitas pengolahan modern dan sistem *cold chain* untuk mempertahankan kualitas produk.

Setiap alternatif memiliki kelebihan dan tantangan implementasi yang berbeda. SPIT menawarkan efisiensi skala ekonomi dan kualitas produk yang konsisten, namun memerlukan investasi infrastruktur yang besar dan sistem manajemen yang kompleks. Program teknologi tepat guna lebih mudah diadopsi dan berkelanjutan, tetapi memiliki keterbatasan dalam peningkatan kapasitas produksi. Sementara ICAP memberikan jaminan keberlanjutan bahan baku, namun memerlukan koordinasi lintas sektor yang intensif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi lapangan dan evaluasi alternatif solusi, rekomendasi kebijakan terbaik yang dapat diimplementasikan dalam jangka waktu dekat adalah **Pengembangan Program Sentra Pengolahan Ikan Terpadu (SPIT) Berbasis Komunitas** dengan pendekatan bertahap dan adaptif.

Rekomendasi Utama:

1. Pembentukan SPIT *Pilot Project*

Membangun 2 sentra pengolahan ikan terpadu di Desa Bontosunggu dan Desa Mekar Indah sebagai *pilot project* dengan kapasitas sesuai kebutuhan lokal (50-100 kg/hari). Setiap sentra dilengkapi dengan fasilitas pengeringan terkontrol, mesin penepung ikan skala menengah, ruang penyimpanan, dan laboratorium mini untuk *quality control*.

2. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) pengolah ikan dengan sistem manajemen profesional dan melaksanakan program pelatihan berkelanjutan meliputi teknik pengolahan modern, manajemen kualitas, *packaging*, dan pemasaran digital.

3. Pengembangan Sistem Pemasaran Terintegrasi

Membangun platform pemasaran online untuk produk olahan ikan dan mengembangkan kemitraan dengan distributor regional serta supermarket untuk menjamin akses pasar yang stabil.

4. Skema Pembiayaan dan Insentif

Menyediakan skema kredit lunak melalui kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dan memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak daerah untuk industri pengolahan ikan selama 3 tahun pertama.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Menerapkan sistem monitoring berbasis Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator* atau KPI) meliputi peningkatan produksi, kualitas produk, pendapatan pengolah, dan ekspansi pasar, dengan evaluasi berkala setiap 6 bulan untuk penyesuaian program.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Food and Agriculture Organization. (2020). "Community-Based Fish Processing: Lessons from the Philippines." *FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper* No. 645. Rome: FAO.
- Government of Kerala. (2018). "Fish Processing Centers Development Program: Impact Assessment Report." Department of Fisheries, Government of Kerala, India.
- Nikijuluw, V. P. H. (2002). *Aktivitas Perikanan dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2019). "Laporan Evaluasi Program Sentra Pengembangan Agribisnis Perikanan (SPAP) Kabupaten Gunungkidul 2015-2019." Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.